

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**

**POLITIK BAHASA
DAN BAHASA POLITIK**

**PREDIKSI PERAN STRATEGIS
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
MENYONGSONG VISI INDONESIA BARU**



DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA PANITIA	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
MAKALAH KUNCI	1
Pemertahanan dan Pengembangan Bahasa Indonesia	3
I Dewa Putu Wijana	
Bahasa dan Susastra untuk Kebangkitan	13
Yudi Latif	
Politik Bahasa Sastra: Strategi Bahasa Ekspresif Produksi Karya Sastra	31
I. B. Putera Manuaba	
BAGIAN 1	45
Dari Nusa Bunga ke Nusantara: Membangun Karakter Bangsa Melalui	47
Tonil Karya Bung Karno di Ende	
Maria Matildis Banda	
Bahasa Indonesia sebagai Penguatan Karakter Bangsa	59
Rustinsyah	
Ketirisan Diglosia dan Kapiltalisasi Identitas: Problema Kebertahanan	73
Bahasa Lokal	
Sri Wiryanti	
Penggunaan "Bahasa Positif" sebagai Alternatif Pemecahan Masalah	83
Karakter dan Jatidiri Bangsa	
Siti Saudah dan Syafriyudin	
Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar sebagai Politik Identitas dan	97
Penguatan Karakter Bangsa	
Sueb Hadi Saputro	

Kosakata Budaya dalam Tatacara Perkawinan Adat Suku Sasak: Salah Satu Alternatif Pengayaan Kosakata Bahasa Indonesia sebagai Identitas dan Penguat Karakter Bangsa Nining Nur Alaini	109
Vickynisasi dan Identitas Generasi Muda Indonesia Akhhmad Mukhlason, Ardhaneswari P.H.P., dan Denny Prastyawanto	123
Masihkah Generasi Muda Indonesia Membanggakan Bahasa Indonesia sebagai Identitas Bangsa?: Refleksi Keindonesiaan dalam Laman “Anti-Malaysia (Malon)” di Facebook Arum Budiastuti	133
BAGIAN 2	147
Peran Strategis Media Massa dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Yani Paryono	149
Papua dalam Jejaring Bahasa Politik dan Politik Bahasa: Studi Kasus UU Otonomi Khusus Papua Hugo Warami	165
Strategi Linguistik dalam Wacana Politik Ni Wayan Sartini	179
Ketaksaan Padanan Kata dan Ungkapan Bahasa Asing dalam Bahasa Indonesia: Sebuah Kajian Politik Bahasa untuk Penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV Irma Setiawan	191
Berfikir Cerdas dan Berujar Mulia dalam Pembelajaran Wajib Nasional Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Mohammad Adib	205
Pengaruh Kurikulum 2013 terhadap Proses Kegiatan Belajar Proses Kegiatan Belajar Mengajar Bahasa Indonesia di Sekolah Dewi Purwanti	221

STRATEGI LINGUISTIK DALAM WACANA POLITIK

Ni Wayan Sartini

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga

e-mail yaniwiratha@yahoo.com

George Orwell mengatakan bahwa pada zaman ini tidak mungkin orang bisa lepas dari politik. Semua masalah adalah selalu masalah politik (1946:154). Politik adalah masalah kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk membuat keputusan, mengendalikan sumber daya, mengendalikan perilaku orang lain dan sering juga mengendalikan nilai-nilai yang dianut orang lain. Bahkan, keputusan-keputusan biasa yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari pun bisa dipandang dari sudut politik (Jones & Wareing, 1999:49). Wacana politik yang dilontarkan oleh politisi bertujuan untuk membujuk para pendengar atau warga masyarakat agar percaya pada validitas dari klaim-klaim politisi. Untuk mencapai tujuan ini, para politisi menggunakan strategi linguistik (bahasa) agar terkesan wajar dan masuk akal. Strategi tersebut antara lain menggunakan implikatur. Implikatur adalah strategi linguistik dalam politik agar pendengar dapat memahami sendiri asumsi-asumsi di balik sebuah informasi tanpa harus mengungkapkan asumsi-asumsi itu secara eksplisit. Strategi linguistik yang lainnya adalah penggunaan eufemisme, gaya bahasa (metafora), leksikalisasi, istilah atau jargon-jargon dan struktur gramatika. Berkaitan dengan struktur bahasa, para politisi cenderung menggunakan kalimat yang panjang dan kalimat pasif.

Kata-kata kunci: strategi linguistik, politik, tujuan.

Pendahuluan

Politik adalah masalah kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk membuat keputusan, mengendalikan sumber daya, mengendalikan perilaku orang lain dan sering kali juga mengendalikan nilai-nilai yang dianut orang lain (Thoman & Shan Wareing, 2007:50). Bahkan, keputusan-keputusan biasa yang dibuat sehari-hari pun dapat dipandang dari sudut politik. Politik dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu itulah politik sangat berperan.

Politik dapat mencakup banyak jenis kegiatan, seperti (1) proses pembuatan kebijakan nasional (politik pemerintahan), (2) kesetaraan gender (politik seksual), (3) persaingan dalam kelompok yang erat jalinannya, seperti persaingan antarrekan sekantor dalam memperebutkan jabatan yang biasanya dilakukan dengan membocorkan atau menyimpan rahasia (politik kantor), (4) cara orang menegosiasikan peran yang harus mereka jalankan dalam kehidupan pribadi mereka, (5) sejarah sistem politik, dan (6)

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan transportasi, pemukiman dan konsumsi yang dapat mempengaruhi lingkungan (politik lingkungan). Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak bisa lepas dari masalah politik.

Bahasa tidak pernah lepas dari politik, betapa fobia pun sebagian di antara kita akan politik itu. Memilih memakai bahasa atau kata-kata tertentu, menekankan pengertian tertentu atas kata, bahkan memakai dialek tertentu, tidak lain dari berpolitik dalam maknanya yang paling dalam dan luas (Pabottinggi, 1990:23). Bahasa bukan semata-mata alat komunikasi atau sebuah sistem kode atau nilai yang secara sewenang-wenang menunjuk sesuatu realitas monolitik. Bahasa adalah suatu kegiatan sosial. Secara sosial ia terikat, dikonstruksi, dan direkonstruksi dalam kondisi khusus dan setting sosial tertentu, ketimbang tertata menurut yang diatur secara ilmiah dan universal (Heryanto, 1990).

Bahasa lewat artikulasi kebahasaan memengaruhi tindakan-tindakan politik. Oleh karena itu, bahasa memiliki peran penting dalam telaah ilmu sosial (Hikam,1996:77). Selanjutnya dikatakan, dalam telaah politik, akhir-akhir ini pemahaman lewat bahasa (*language discourse*) semakin diakui pentingnya, terutama setelah muncul pascamodernisme dan pascastrukturalisme dalam kancah filsafat dan epistemologi modern. Bahasa dan praktik kebahasaan tidak lagi dimengerti dalam konteks perspektif konvensional, yaitu sebagai alat dan medium netral yang dipakai untuk menjelaskan kenyataan sosial-politik. Namun, semakin disadari bahwa bahasa di dalam dirinya tampil sebagai representasi dari dan ruang bagi penggelaran berbagai macam kuasa. Oleh karena itu, bahasa lantas dilihat pula sebagai salah satu ruang tempat konflik-konflik berbagai kepentingan, kekuatan, kuasa, proses hegemoni dan hegemoni tandingan terjadi.

Pandangan Bahasa dalam Konsep Wacana Kritis

Dalam politik, bahasa digunakan tidak sekadar berkomunikasi, tetapi digunakan untuk maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan pertama diwakili oleh kaum positivisme-empirisme, yang kedua disebut konstruktivisme, sedangkan yang ketiga disebut pandangan kritis. Pandangan

ketiga ini mengoreksi pandangan konstruktivisme yang dianggap kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional (Eryanto,2000:6).

Selanjutnya dikatakan bahwa bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa; batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan. Dengan pandangan semacam ini, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam konteks politik, digunakan berbagai strategi untuk tujuan-tujuan tertentu. Salah satu strategi tersebut adalah strategi kebahasaan atau strategi linguistik. Untuk mencapai tujuan dan mendapat efek tertentu, pembicara dalam hal ini politisi memaksimalkan bahasa dengan berbagai pirantinya. Hal ini dilakukan karena para politisi sadar bahwa bahasa itu memiliki efek yang sangat dahsyat dalam rangka membentuk opini atau mengubah opini masyarakat dan bahkan membentuk subjek-subjek tertentu dengan kehebatan bahasa. Pengguna bahasa atau pembicara mengetahui bukan hanya aturan-aturan tata bahasa, kalimat, namun juga aturan-aturan untuk menggunakan unit-unit yang lebih besar dalam menyelesaikan tujuan-tujuan pragmatik dalam situasi sosial (Sobur,2004:49). Bahasa digunakan dengan suatu strategi guna mencapai tujuan yang diinginkan seperti membuat permohonan, mendapat giliran, bersifat sopan, atau memperoleh kerja sama.

Strategi Linguistik dalam Wacana Politik

Strategi adalah cara yang digunakan atau ditempuh pembicara untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini, cara yang digunakan oleh para politisi dalam kancah perpolitikan memiliki maksud dan tujuan tertentu pula. Salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan adalah dengan strategi linguistik atau bahasa. Wacana tidak pernah lepas dari konteks politik, bahasa tidak bermakna konvensional, melainkan

bahasa untuk memengaruhi atau bahkan membongkar praktik-praktik kekuasaan. Wacana politik dilandaskan pada satu prinsip, yaitu bahwa persepsi orang terhadap masalah-masalah atau konsep tertentu bisa dipengaruhi oleh bahasa. Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh politisi adalah membujuk para pendengar atau warga masyarakat agar percaya pada validitas dari klaim-klaim seorang politisi. Berikut ini adalah strategi-strategi linguistik dalam wacana politik.

Menurut van Dijk (2004:51, dalam Mandarani, 2013:20), ada berbagai strategi yang digunakan dalam konteks politik untuk pencitraan baik tokoh maupun partai. Di antara strategi yang diajukan van Dijk tersebut beberapa di antaranya merupakan strategi linguistik. Strategi itu antara lain strategi pengajuan eufemisme, strategi hiperbola, strategi implikasi, strategi ironi, strategi leksikalisasi, strategi metafora, strategi penggambaran negatif pihak lain, pengajuan ungkapan normatif, dan strategi persangkaan (presuposisi). Strategi-strategi tersebut memaksimalkan penggunaan bahasa untuk tujuan-tujuan tertentu.

Implikatur

Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah implikatur. Implikatur adalah cara di mana pendengar bisa memahami sendiri asumsi-asumsi di balik sebuah informasi tanpa harus mengungkapkan asumsi-asumsi itu secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah informasi tambahan yang bisa dideduksi dari sebuah informasi tertentu (Jones dan Waering, 1999). Sejalan dengan itu, Grice mengemukakan bahwa implikatur ialah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu yang berbeda itu adalah maksud pembicara yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Dapat dikatakan bahwa implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi (Ahmad dan Abdullah, 2013:37). Van Dijk menyebut strategi ini dengan strategi implikasi (*implication*), yaitu pembicara tidak selalu harus mengungkapkan apa yang diketahui atau diyakini secara eksplisit.

Implikatur berkaitan erat dengan pengupasan makna dalam komunikasi. Wacana harus dikupas untuk memahami maksud dan makna yang ingin disampaikan. Dengan menggunakan strategi linguistik, khususnya pragmatik ini, perasaan wajar dan masuk

akal ini dapat ditumbuhkan kepada pendengar dengan cara menambahkan pendapat-pendapat dari pembicara atau politisi di balik informasi tanpa harus mengungkapkan secara eksplisit. Implikatur dapat digunakan untuk membuat orang secara tidak sadar menerima begitu saja pendapat-pendapat yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan lagi.

Dalam komunikasi politik, penggunaan implikatur adalah sesuatu yang wajar karena implikatur dapat menyamarkan maksud, keinginan, dan motif-motif yang ada di balik wacana yang dilontarkan. Sebagai contoh, seorang politisi dalam berkampanye mengatakan "Mari menuju ke era yang lebih baik" menyiratkan bahwa semua masyarakat sepakat bahwasanya sistem politik saat ini perlu diperbaiki sehingga pendapat bahwa sistem yang ada saat ini perlu diperbaiki lagi menjadi terasa wajar dan masuk akal bagi orang-orang yang sepakat dengan pernyataan tersebut. Penggunaan bahasa dalam slogan-slogan politik berusaha untuk mengubah ideologi masyarakat sehingga dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat. Ini merupakan salah satu strategi linguistik dalam komunikasi politik. Contoh pernyataan yang mengandung implikatur adalah "Ada kekuatan besar dalam kasus korupsi itu". Pernyataan tersebut tidak secara jelas menunjuk pada instansi atau sosok tertentu, namun secara implisit sudah menunjuk pada suatu kekuasaan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat.

Penggunaan Eufemisme

Strategi eufemisme merupakan strategi dalam penggunaan pernyataan yang menghaluskan makna. Bahasa politik sebagian besar terdiri atas eufemisme, pendapat-pendapat yang patut dipertanyakan dan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas. Orwell mengatakan bahwa bahasa dari kalangan politik dirancang untuk membuat pembunuhan terdengar mulia, serta untuk membuat omong kosong terdengar menyakinkan.

Eufemisme juga terjadi dalam komunikasi politik di Indonesia. Seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru. Komunikasi politik saat itu banyak diwarnai oleh kramanisasi bahasa. Anderson mengatakan bahwa Bahasa Indonesia sudah kehilangan etos revolusionernya. Ia tertimpa proses penghalusan (eufemisme) sehingga dinamika yang semula menandainya kini tidak ada lagi. Meskipun wajahnya tetap sama, isinya

sesungguhnya lain. Selanjutnya dikatakan bahwa terlepas dari kata-kata “*ngoko*” bahasa kebangsaan itu telah menjadi semakin elitis, tidak lagi merakyat sebagaimana Melayu revolusioner yang merupakan pokoknya. Singkatnya, ia sudah mengalami proses kramanisasi, ia sudah terperangkap dalam imaji orang-orang Jawa tentang politik dimana topeng punya peranan penting.

Pabottinggi (1996) mengatakan bahwa kramanisasi yang dimaksudkan oleh Anderson tidak lain dari penekanan terpadu pada prinsip kehalusan dan anggapan tentang kebutuhan sosiologis akan “topeng”. Di sini kehalusan dan topeng dipandang menyatu, yang satu tidak jadi tanpa yang lain. Bahasa dipakai secara tidak bermuka-muka, secara tidak langsung ke masalah, melainkan ditopang oleh praktik yang menghargai sikap tidak terus terag (*indirection*). Praktik *ethok-ethok* seperti yang ditekankan Geertz pada subkultur priyayi agaknya juga memenuhi fungsi yang sama. Beberapa contoh eufemisme dalam wacana politik .

- (1) Telah terjadi *kesalahan prosedur* dalam penggunaan anggaran.
- (2) Beberapa anggota dewan telah *diamankan* oleh pihak berwajib.
- (3) Bahan bakar minyak akan mengalami *penyesuaian harga*.
- (4) Ketua umum partai sudah *dibebastugaskan*.
- (5) *Lembaga pemasyarakatan* menjadi tempat bagi para koruptor.

Kata-kata yang dicetak miring seperti *kesalahan prosedur* penghalusan dari *korupsi*, *diamankan* penghalusan dari *ditangkap*, *penyesuaian harga* penghalusan dari *kenaikan harga*, *dibebastugaskan* merupakan bentuk halus dari *dipecat*, dan *lembaga pemasyarakatan* istilah halus untuk *penjara*. Konsekuensi dari penghalusan kata-kata dalam wacana politik tersebut adalah terjadinya kooptasi makna kata-kata itu sendiri sehingga makna harfiah kata itu belum sampai pada masyarakat.

Pernyataan (1) Dugaan ada penyuapan, dan (2) Ada dugaan penyalahgunaan wewenang, merupakan pernyataan yang sangat santun walaupun sebenarnya ada tindakan penyuapan yang benar-benar dilakukan. Kata *dugaan* digunakan sangat hati-hati dalam rangka menjaga stabilitas dan dalam pragmatik hal itu dilakukan untuk menyelamatkan muka baik muka masing-masing pihak. Kondisi ini disebut dengan menyelamatkan muka atau *face threatening act* (FTA).

Penggunaan Diksi (Leksikalisasi)

Roger Fowler, dkk. (dalam Eryanto, 2000) melihat bahasa sebagai sistem klasifikasi. Bahasa menggambarkan bagaimana realitas dunia dilihat, memberi kemungkinan seseorang untuk mengontrol dan mengatur pengalaman pada realitas sosial. Akan tetapi, sistem klasifikasi ini berbeda-beda antara seseorang atau satu kelompok dengan kelompok lain karena kelompok yang berbeda mempunyai pengalaman budaya, sosial, dan politik yang berbeda. Fowler melihat bagaimana pengalaman dan politik yang berbeda itu dapat dilihat dari bahasa yang dipakai, yang menggambarkan bagaimana pertarungan sosial terjadi. Sebagai contoh, kata campur tangan, tebang pilih, dan sebagainya membawa konsekuensi bahwa ada campur tangan pemerintah dalam sistem hukum kita dan memilih kasus-kasus tertentu untuk diusut dan disidang. Dalam kasus akhir-akhir ini, ketika Ketua MK ditangkap oleh KPK, wacana-wacana politik pun bergulir dengan berbagai leksikal yang digunakan untuk kasus tersebut. Pernyataan "Delapan hakim itu sekarang jadi orang tercurigai". Leksikal tercurigai muncul dalam konteks bahwa Hakim-hakim MK dicurigai menerima suap, walaupun belum tentu benar. Kata ini muncul setelah ada kata terperiksa yang merujuk pada sosok yang diperiksa dalam proses peradilan. Frase politik dinasti saat ini ditujukan pada kasus suap yang melibatkan adik seorang gubernur. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa dinasti politik terjadi karena posisi-posisi strategis dalam pemerintahan gubernur tersebut dipegang oleh anak, keponakan, adik, ibu tiri dan sebagainya. Leksikalisasi ini muncul tentu tidak semata-mata hanya sebagai kata-kata konvensional, tetapi ada muatan-muatan politik dalam leksikal tersebut.

Oleh karena itu, kosakata tertentu bukan hanya tidak netral dan tidak menggambarkan realitas, tetapi juga mengandung penilaian. Linguistik kritis dalam hal ini membedah dan membongkar kemungkinan pemakaian diksi-diksi tertentu untuk melegitimasi seseorang atau suatu gagasan atau marginalisasi seseorang atau suatu gagasan. Strategi dalam pilihan-pilihan linguistik tersebut menurut Roger Fowler membawa nilai ideologis tertentu. Penggunaan kata, kalimat, susunan, dan bentuk kalimat tertentu, proposisi tidak dipandang semata sebagai persoalan teknis tata bahasa atau linguistik, tetapi ekspresi dari ideologi yaitu upaya untuk membentuk pendapat umum,

meneguhkan, dan membenarkan pihak sendiri dan mengucilkan pihak lain (Eryanto,2000:133).

Van Dijk menyatakan bahwa strategi leksikalisasi ini adalah penyebutan kata-kata kunci yang menjadi dasar dari konsep dan keyakinan pihak tertentu. Sebagai contoh, sebuah partai menyatakan bahwa partai mereka *bersih, santun, dan jujur* diyakini sebagai kata-kata kunci yang menjadi dasar dari konsep partai tersebut. Dengan kata-kata kunci itu, masyarakat diharapkan memiliki keyakinan yang sama sehingga tingkat elektabilitas partai akan naik.

Struktur Gramatika

Dalam komunikasi politik, persoalan bahasa menjadi sangat penting karena berhubungan dengan penonjolan-penonjolan terhadap suatu objek atau peristiwa. Fowler (dalam Eryanto, 2000) memandang bahasa sebagai satu set kategori dan proses. Secara umum, ada tiga model yang diperkenalkan, yaitu model transitif yang melihat bagian mana yang dianggap sebagai penyebab suatu tindakan dan bagian mana sebagai akibat dari suatu tindakan. Model kedua adalah intransitif yang menghubungkan seorang aktor dengan proses tanpa menjelaskan atau menggambarkan akibat atau objek yang dikenai. Model ketiga adalah relasional yakni model yang menggambarkan hubungan antara dia entitas atau benda.

Gramatika tidak hanya berhubungan dengan persoalan teknis kebahasaan, juga bukan semata-mata persoalan cara menulis, tetapi berkaitan erat dengan bentuk kalimat karena bentuk kalimat menentukan makna kalimat yang dihasilkan. Ada dua bentuk kalimat, yaitu aktif dan pasif. Dalam kalimat aktif, yang ditekankan adalah subjek pelaku suatu kegiatan, sedangkan dalam kalimat pasif, yang ditekankan adalah sasaran dari suatu pelaku atau tindakan. Orwell (1999) menyarankan untuk tidak menggunakan bentuk pasif apabila bisa menggunakan bentuk aktif. Hal ini terkait dengan tata bahasa. Penggunaan bentuk kalimat aktif biasanya memberikan informasi yang lebih jelas dan lebih langsung. Penggunaan bentuk kalimat pasif bersifat lebih formal, lebih rumit, dan karena informasi yang diberikan lebih sedikit maka sulit dipahami.

Penggunaan Metafora dan Hiperbolisme

Retorika adalah seni kuno yang mengajarkan tentang berbicara yang elegan dan persuasif. Prinsip-prinsip dasar retorika Yunani Kuno dapat memperkuat dampak yang ditimbulkan oleh ucapan atau tulisan para politisi. Dalam retorika ini sering digunakan gaya-gaya bahasa yang konkret untuk mendapatkan gambaran yang konkret dan bukan sekadar gambaran abstrak tentang sesuatu yang disampaikan.

Gaya bahasa yang sering digunakan dalam wacana politik adalah hiperbolisme, yakni gaya bahasa yang mengajukan pernyataan yang melebihkan makna. Sebagai contoh, pernyataan dari seorang tokoh "*MK bersih seratus persen*" tentu sangat melebihkan makna karena kenyataannya terjadi juga kasus penyuapan dalam tubuh MK. Di samping itu, dalam wacana politik Indonesia seorang politisi selalu mengajukan pernyataan yang melebihkan-lebihkan makna tentang sosok pemimpinnya.

Di samping gaya bahasa, dalam wacana politik juga digunakan metafora yang merupakan sebuah sarana linguistik yang digunakan untuk mendapatkan efek-efek tertentu. Strategi metafora merupakan strategi yang menggunakan kata-kata kiasan yang mengandung makna lebih kuat dari kata yang sebenarnya. Ketika seorang politisi ditolak menjadi Ketua Komisi III DPR RI alasannya karena dianggap sebagai *badut*, atau pernyataan Gus Dur tentang anggota DPR RI sebagai *taman kanak-kanak*, para koruptor sebagai *tikus-tikus*, dan sebagainya. Frase *pintu masuk* dalam pernyataan "*Kasus tersebut merupakan pintu masuk kasus-kasus yang lainnya*". Frase *pintu masuk* dianalogikan sebagai pembuka pertama untuk mengusut kasus-kasus lainnya. Begitu juga dengan frase *dinasti politik*. Frasesemacam ini sangat berguna bagi para politisi karena dengan frase ini, sebuah gambaran tentang kondisi politik dapat disajikan dengan sederhana.

Dalam retorika tradisional, metafora digolongkan sebagai sebuah kiasan, yakni sebagai sebuah gambaran yang mengklasifikasikan adanya variasi makna dalam penggunaannya, lebih tepatnya dalam proses denominasi (Ricoeur, 2002:106). Lebih lanjut dikatakan, metafora milik permainan bahasa yang menata penamaan sesuatu. Metafora merepresentasikan perluasan makna dari suatu nama melalui deviasi dari

makna literal kata. Dari contoh-contoh yang sering kita temui dalam wacana politik Indonesia, para politisi cenderung menggunakan metafora untuk tujuan-tujuan dan motivasi-motivasi tertentu. Dengan demikian, gaya bahasa memiliki beberapa fungsi penting dalam wacana politik, yakni membuat ide-ide yang abstrak menjadi lebih mudah diterima dan selain itu juga memiliki kekuatan ideologis yang besar karena seringkali menghubungkan apa yang disampaikan politisi dengan pengalaman sehari-hari yang punya makna emosional yang besar bagi pendengar.

Simpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi linguistik yang digunakan dalam wacana politik adalah implikatur, eufemisme, leksikalisasi, struktur gramatika, metafora, dan hiperbolisme. Penggunaan strategi-strategi ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dengan strategi linguistik ini, salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh politisi adalah membujuk para pendengar atau warga masyarakat agar percaya pada validitas dari klaim-klaim seorang politis. Lebih lanjut, penggunaan bahasa dalam wacana politik tidak semata-mata menyampaikan informasi, melainkan ada motivasi dan maksud serta tujuan yang ingin dicapai. Strategi dalam pilihan-pilihan linguistik membawa nilai ideologis tertentu. Penggunaan kata, kalimat, susunan, bentuk kalimat, dan proposisi tertentu tidak dipandang semata sebagai persoalan teknis tata bahasa atau linguistik, tetapi ekspresi dari ideologi yaitu upaya untuk membentuk pendapat umum, sekaligus meneguhkan dan membenarkan pihak sendiri serta mengucilkan pihak lain.

Referensi

- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.
- Eryanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Mandarani, Vidya. 2013. "Pencitraan Joko Widodo dan Fauzi Bowo dalam Media Harian *Kompas* pada Pilkada DKI Jakarta 2012". Tesis pada Program Magister Kajian Sastra dan Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya.

Pabottinggi, Mochtar. 1996. "Bahasa, Kramanisasi, dan Kerakyatan" dalam Yudi Latif dan Idy Subandi Ibrahim (Eds.), *Bahasadan Kekuasaan*. Bandung: Mizan

Ricoeur, Paul. 2002. *Filsafat Wacana: Membedah Makna dalam Anatomi Bahasa*. Yogyakarta : IRCiSod.

Thomas, Linda dan Shan Wareing. 1999. *Language, Society, and Power*. New York: Routledge

ISBN: 978-602-14544-04



9 786021 454404



DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS AIRLANGGA